

Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Di Kantor Camat Medan Baru

Agus Edy Rangkuti, Politeknik Negeri Medan, agusrangkuti@polmed.ac.id

Roby Hadi Putra, Politeknik Negeri Medan, robbyhadiputra@polmed.ac.id

Anwar Fuad Alamsyah Lubis, Politeknik Negeri Medan, anwarfuadalamasyah@polmed.ac.id

Amalia Rahmadani Ilham, Politeknik Negeri Medan, amaliarahmadani@polmed.ac.id

Keywords:

Digitalisasi,
Administrasi
Pemerintahan,
Pelatihan,
Peningkatan
Kapasitas SDM,
Kantor Camat
Medan Baru.

Abstrak: Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Untuk mendukung implementasi tersebut, penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kantor Camat Medan Baru. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas SDM melalui digitalisasi administrasi pemerintahan di Kantor Camat Medan Baru. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan keterampilan baru kepada pegawai dalam mengelola tugas administratif yang berbasis teknologi informasi. Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah kombinasi antara pelatihan tatap muka dan pembelajaran daring (blended learning), dengan melibatkan 25 peserta yang berasal dari berbagai jabatan di Kantor Camat Medan Baru. Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menggunakan aplikasi digital yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Evaluasi pasca-pelatihan mengungkapkan bahwa peserta merasa lebih siap dan percaya diri dalam menerapkan teknologi informasi dalam tugas administratif mereka. Artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan digitalisasi administrasi pemerintahan di masa depan, dengan menekankan pentingnya pelatihan secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur teknologi, serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien

Pendahuluan

Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018). Digitalisasi diharapkan dapat mempercepat berbagai proses administratif dan mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang rentan terhadap kesalahan serta memakan waktu. Namun, penerapan digitalisasi di Indonesia, terutama di tingkat pemerintahan daerah khususnya di kecamatan medan baru masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi informasi yang digunakan dalam administrasi pemerintahan. Menurut Kementerian Dalam Negeri (2020), meskipun banyak instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan sistem digital, banyak pegawai yang belum terampil dalam menggunakan perangkat digital tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan teknologi dan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung tugas administratif.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021), terdapat sekitar 16.000 kecamatan di seluruh Indonesia, yang masing-masing berperan penting dalam pelayanan publik. Namun, hanya sekitar 50% dari kecamatan yang telah menerapkan sistem administrasi berbasis digital secara penuh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM di tingkat kecamatan menjadi prioritas penting untuk mendorong penerapan digitalisasi yang lebih luas. Studi terkait mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai peneliti dan lembaga pemerintah. Misalnya, penelitian oleh Soesilo (2019) mengungkapkan bahwa penerapan e-government di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun masih terbentur pada masalah infrastruktur dan kemampuan SDM. Penelitian lainnya oleh Prabowo (2020) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada kesiapan SDM dan pemahaman mereka terhadap pentingnya teknologi dalam mendukung kinerja birokrasi.

Selain itu, penelitian oleh Purnama dan Santoso (2020) juga menyebutkan bahwa pelatihan dan pembekalan SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan digitalisasi administrasi di berbagai instansi pemerintah. Mereka menemukan bahwa instansi yang rutin mengadakan pelatihan berbasis teknologi informasi cenderung lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi dan mampu mengimplementasikan e-government dengan lebih efektif. Kecamatan Camat Medan Baru, sebagai salah satu instansi pemerintah di Kota Medan, merupakan contoh yang mencerminkan tantangan ini. Meskipun Kantor Camat Medan Baru telah memiliki akses terhadap teknologi informasi, penerapan teknologi dalam pekerjaan administratif masih terbatas. Pegawai di kantor kecamatan ini banyak yang belum terlatih untuk menggunakan aplikasi digital yang diperlukan dalam

memproses berbagai layanan publik, seperti pengelolaan data kependudukan, administrasi perizinan, dan lain-lain. Hal ini berpotensi menghambat percepatan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Dalam permasalahan yang ditemui dalam pembuatan administrasi digital kependudukan masih dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, sehingga pelayanan dilaksanakan belum berjalan efektif, sehingga digitalisasi administrasi pemerintahan belum berjalan maksimal, ini salah satu permasalahan diantara banyak permasalahan yang ada, karena sesuai dengan visi dan misi walikota medan 2025-2030 Mewujudkan Medan "BERTUAH" yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data. Salah satu misi diantara banyak misi yang lebih dekat dengan kegiatan pengabdian masyarakat penulis diantaranya yakni Membangun Tertib Administrasi Medan Yang Komprehensif Menjadi Medan Satu Data dan Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Ruang Publik, sehingga pelayanan digital ini bisa dilaksanakan kedepannya.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di kantor Camat Medan Baru tentu ini menambah ketrampilan dan keilmuan sehingga Digitalisasi administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan memerlukan penguatan dalam aspek SDM. Oleh karena itu, pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi informasi sangat penting dilakukan. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga membangun pemahaman tentang pentingnya digitalisasi dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Sehingga pengabdian ini mampu menyelesaikan permasalahan yang berada di kantor Camat Medan Baru dengan menggunakan pendekatan Service-Learning, dimana perguruan tinggi hadir sebagai pelayan untuk mitra/masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi melalui pendekatan akademik dan bersifat keilmuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sdm Di Kantor Camat Medan Baru? Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi (jika ada) serta tinjauan pustaka yang memuat kajian pustaka dan landasan teori yang relevan. Sumber keterangan ditunjuk dengan menuliskan di dalam kurung: nama akhir penulis dan tahun penerbitan. Disajikan secara sistematis sehingga didapatkan gambaran tentang dasar pembuatan makalah ini dan hasil yang diharapkan.

Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kantor Camat Medan Baru melalui pelatihan digitalisasi administrasi pemerintahan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai pentingnya digitalisasi dalam

administrasi pemerintahan, serta keterampilan teknis dalam menggunakan aplikasi digital yang mendukung tugas administratif. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, mempercepat proses administratif, dan mendorong pegawai untuk lebih aktif dalam mendukung program digitalisasi pemerintah. Evaluasi hasil pelatihan juga akan dilakukan untuk merancang pengembangan SDM berkelanjutan dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan infrastruktur teknologi yang mendukung keberhasilan digitalisasi di Kantor Camat Medan Baru.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Digitalisasi administrasi pemerintahan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses administrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018). Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pemerintahan merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. SPBE bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Beberapa contoh implementasi digitalisasi administrasi di Indonesia antara lain adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan untuk mengelola data kependudukan dan sistem e-Government untuk berbagai layanan publik.

Studi oleh Purnama dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi administrasi telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah, banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi pegawai, dan resistensi terhadap perubahan. Namun, jika dilaksanakan dengan baik, digitalisasi dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan akurasi data yang dikelola.

Pelatihan sebagai Sarana Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi perubahan teknologi, termasuk dalam digitalisasi administrasi pemerintahan. Menurut Armstrong (2012), pelatihan adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Di sektor pemerintahan, pelatihan SDM bertujuan untuk membekali pegawai dengan kemampuan baru agar dapat mengimplementasikan teknologi dengan lebih efektif dalam pekerjaan administratif.

Pelatihan berbasis teknologi informasi dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengenalan perangkat lunak administrasi, penggunaan sistem e-Government, serta pemahaman tentang

kebijakan digitalisasi yang ada di Indonesia. Menurut Soesilo (2019), pelatihan berbasis teknologi informasi sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola administrasi pemerintahan dengan menggunakan sistem digital yang ada. Hasil penelitian oleh Prabowo (2020) juga mengungkapkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai pemerintah, asalkan pelatihan tersebut dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Peningkatan Kapasitas SDM dalam Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan digitalisasi administrasi pemerintahan. Menurut Hidayat (2021), peningkatan kapasitas SDM di pemerintahan perlu dilakukan melalui pelatihan yang berbasis pada kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada. Peningkatan kapasitas tidak hanya mencakup aspek keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup aspek pemahaman tentang manfaat dan dampak dari penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan. Supriyanto (2019) menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam implementasi digitalisasi pemerintahan di Indonesia adalah rendahnya kapasitas SDM di tingkat daerah, khususnya di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM di tingkat kecamatan sangat penting, mengingat peran mereka sebagai pelaksana utama dalam memberikan pelayanan publik. Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan keterampilan teknis, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi kesalahan dalam pengolahan data administrasi.

Selain itu, menurut Setiawan (2021), pelatihan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman pegawai mengenai pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dengan memahami manfaat teknologi, pegawai lebih termotivasi untuk mengimplementasikan teknologi dalam pekerjaan mereka.

Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan dalam Pengembangan SDM

Pengembangan SDM yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Menurut Supriyanto (2019), pelatihan tidak cukup hanya dilakukan sekali, melainkan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pegawai terus memperoleh pengetahuan dan keterampilan terbaru seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini sangat penting karena teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dengan cepat, dan untuk tetap relevan dalam dunia kerja, pegawai harus selalu mengikuti perkembangan tersebut. Selain itu, pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu pegawai untuk menanggulangi resistensi terhadap perubahan. Penelitian oleh Siregar (2021) menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam digitalisasi pemerintahan adalah ketidakmampuan beberapa pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan. Pelatihan berkelanjutan dapat mengurangi hambatan ini dengan memberikan pegawai kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru secara bertahap dan lebih efektif.

Implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan di Indonesia membutuhkan peran aktif SDM yang terlatih dan berkapasitas. Pelatihan berbasis teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai untuk dapat menjalankan tugas administratif berbasis digital dengan lebih efisien dan akurat. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah, termasuk Kantor Camat Medan Baru, untuk terus mengembangkan program pelatihan dan pembekalan SDM agar dapat mengimplementasikan digitalisasi dengan maksimal.

Permasalahan

Kecamatan Medan Baru merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 terbentuk dan disahkan menjadi kecamatan definitif dari 4 kecamatan yang ada di Kota Medan membawahi 18 kelurahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Medan Baru di Propinsi Sumatera Utara dan pemekaran 8 kecamatan di Kota Medan. Salah satu kecamatan yang wilayahnya dimekarkan adalah Kecamatan Medan Baru yang membawahi 6 kelurahan serta 64 lingkungan sampai saat ini serta memiliki luas wilayah 539,17 Ha. Kantor Camat Medan Baru menghadapi beberapa permasalahan terkait implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Pertama, terdapat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam mengoperasikan teknologi informasi, yang menghambat efisiensi proses administrasi. Selain itu, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, seperti perangkat keras yang usang dan jaringan yang lambat, memperburuk penerapan digitalisasi. Resistensi terhadap perubahan juga menjadi masalah, dengan pegawai yang lebih terbiasa dengan sistem manual dan kurang memahami pentingnya digitalisasi. Waktu dan sumber daya yang terbatas untuk pelatihan serta ketergantungan pada proses manual yang sudah berjalan lama juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan melalui pengabdian ini mencakup pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, serta pendekatan manajerial untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, agar digitalisasi administrasi pemerintahan dapat terlaksana dengan optimal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018; Purnama & Santoso, 2020)

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan blended learning, yang mengkombinasikan pelatihan tatap muka dan pembelajaran daring untuk memaksimalkan efektivitas dan fleksibilitas. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, di mana survei awal

dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan keterampilan pegawai Kantor Camat Medan Baru terkait penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan hasil survei, materi pelatihan disusun untuk mengakomodasi kebutuhan pegawai, terutama mengenai aplikasi administrasi seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-Government. Pelatihan dilaksanakan selama lima hari, dengan materi yang dibagi menjadi pengenalan digitalisasi, penggunaan aplikasi, dan evaluasi penerapan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Setelah pelatihan, pendampingan pasca-pelatihan dilakukan untuk memastikan pegawai dapat menerapkan keterampilan yang telah diperoleh, baik melalui sesi konsultasi tatap muka maupun daring. Evaluasi dilakukan melalui tes dan observasi penerapan teknologi di tempat kerja, dengan umpan balik yang digunakan untuk perbaikan program pelatihan ke depan. Dengan metode ini, diharapkan kapasitas SDM di Kantor Camat Medan Baru dapat meningkat secara signifikan dalam mengelola administrasi pemerintahan berbasis digital.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengabdian ini dimulai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan melalui survei dan wawancara untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan keterampilan pegawai di Kantor Camat Medan Baru terkait penggunaan teknologi informasi. Menurut Armstrong (2012), analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa materi pelatihan relevan dengan kekurangan keterampilan yang ada. Setelah itu, materi pelatihan disusun berdasarkan hasil analisis tersebut, mencakup pengenalan aplikasi administrasi pemerintahan seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Pelatihan dilakukan dalam format blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, yang memungkinkan peserta untuk memahami konsep dasar digitalisasi pemerintahan dan langsung mempraktekkan penggunaan aplikasi di lingkungan kerja. Sebagai referensi, Purnama dan Santoso (2020) mengungkapkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memberikan fleksibilitas kepada peserta dan meningkatkan keterlibatan mereka. Setelah pelatihan selesai, dilakukan pendampingan pasca-pelatihan untuk membantu pegawai mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari mereka, seperti yang diusulkan oleh Soesilo (2019), yang menyatakan bahwa pendampingan sangat penting untuk memastikan penerapan praktis dari pelatihan. Terakhir, dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelatihan melalui tes dan observasi langsung di tempat kerja. Evaluasi ini penting untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam menggunakan teknologi informasi, sebagaimana disarankan oleh Supriyanto (2019). Dengan tahapan ini, pengabdian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM di Kantor Camat Medan Baru dalam mengelola administrasi berbasis digital dengan lebih efektif. Dalam tahapan pelatihan administrasi pemerintahan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan seperti yang terlihat dibawah ini.

Tabel 1. Rundown Acara

No	Waktu	Kegiatan	Pemateri	
1	08.00-10.00	Tantangan untuk menciptakan pelayanan prima dalam pemerintahan adalah digitalisasi.	Agus Rangkuti,S.E, M.Si	Edy
2	10.00-12.00	Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mendukung Digitalisasi Administrasi Pemerintah Daerah	Roby Putra,S.AP. M.A.P	Hadi
3	14.00-16.00	Strategi Penguatan Kompetensi Teknis SDM dalam Penggunaan Aplikasi Pemerintahan Digital bagi Lurah dan Kasi Pemerintahan	Anwar Alamsyah M.A.P	Fuad Lubis,
4	16.00-18.00	infrastruktur pendukung digitalisasi di tingkat kecamatan dalam mendukung layanan pemerintahan	Amalia Ilham, M.Si	Rahmadani

Berdasarkan table diatas merupakan acuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di kecamatan medan baru terkait dengan implementasi digitalisasi amdministrasi pemerintahan. Dalam kegiatan pengabdian tentu mempunyai harapan ada peningkatan dalam perubahan setelah pelaksanaan pengabdian nantinya.

Gambar. 1 Flyer Kegiatan



Pembahasan

Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di Kantor Camat Medan Baru menunjukkan hasil yang sangat signifikan, baik dari segi peningkatan pengetahuan maupun

keterampilan pegawai dalam mengoperasikan teknologi informasi untuk administrasi pemerintahan. Sebelum pelatihan, banyak pegawai yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang aplikasi digital yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi e-Government lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi, setelah mengikuti pelatihan, hampir seluruh peserta menunjukkan peningkatan keterampilan yang substansial dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk tugas administratif sehari-hari. Purnama dan Santoso (2020) menyatakan bahwa pelatihan berbasis teknologi informasi dapat mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan mempercepat proses administrasi, yang juga tercermin dalam praktik di Kantor Camat Medan Baru. Pegawai yang sebelumnya merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital kini lebih percaya diri dan mampu menjalankan tugas administrasi dengan lebih efisien, sesuai dengan temuan Armstrong (2012), yang menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur dapat meningkatkan keterampilan teknis pegawai secara signifikan.

Lebih lanjut, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperbaiki pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan di kantor camat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, pegawai dapat mengakses data lebih cepat dan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2019), yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi dapat mempercepat proses dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas layanan publik yang lebih baik. Pegawai kini dapat mengakses dan mengolah data kependudukan serta memproses administrasi perizinan dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Namun, meskipun hasil yang dicapai sangat positif, beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Salah satu kendala utama adalah resistensi terhadap perubahan yang dirasakan oleh sebagian pegawai, terutama yang lebih senior. Mereka merasa lebih nyaman dengan sistem manual yang sudah lama mereka gunakan. Soesilo (2019) mengemukakan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah hambatan utama dalam implementasi digitalisasi administrasi di pemerintahan, yang juga terjadi di Kantor Camat Medan Baru. Beberapa pegawai menunjukkan kecemasan terkait kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan sistem digital, yang memerlukan waktu dan dukungan untuk diatasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi resistensi ini, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dalam memberikan pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari digitalisasi.

Selain itu, meskipun pelatihan berhasil meningkatkan keterampilan pegawai, infrastruktur teknologi yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam implementasi digitalisasi secara optimal. Beberapa perangkat keras yang digunakan sudah cukup usang dan tidak mendukung

aplikasi-aplikasi terbaru dengan lancar. Menurut Hidayat (2021), untuk memastikan keberhasilan implementasi digitalisasi, selain pelatihan SDM, perlu dilakukan perbaikan dan pembaruan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional kantor. Jika infrastruktur ini tidak ditingkatkan, maka penggunaan aplikasi digital akan terbatas, meskipun SDM sudah terlatih. Pelatihan ini juga menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keterampilan pegawai terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi. Setiawan (2021) menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan secara berkala dapat membantu pegawai menghadapi perubahan dan pembaruan sistem teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengabdian ini menyarankan agar pelatihan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi diadakan secara rutin, dengan topik-topik yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan administrasi pemerintahan yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, hasil pelatihan ini menunjukkan dampak positif yang besar terhadap peningkatan kapasitas SDM di Kantor Camat Medan Baru dalam mengelola administrasi pemerintahan berbasis digital. Pegawai kini lebih mampu memanfaatkan teknologi untuk tugas administratif mereka, yang meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Namun, untuk keberlanjutan digitalisasi yang lebih sukses, pengembangan pelatihan berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas. Hidayat (2021) menekankan bahwa pembaruan teknologi dan pelatihan yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa digitalisasi di pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi publik.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM di Kantor Camat Medan Baru telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menggunakan aplikasi digital, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi e-Government lainnya, dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam melaksanakan tugas administratif. Meskipun hasil yang diperoleh sangat positif, permasalahan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan ketergantungan pada sistem manual masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan bahwa dengan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, kapasitas SDM dapat terus berkembang untuk mendukung implementasi digitalisasi yang optimal.

Saran

Untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan digitalisasi administrasi pemerintahan di Kantor Camat Medan Baru, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pelatihan berkelanjutan harus dilaksanakan secara rutin untuk memperbarui keterampilan pegawai dan mengatasi resistensi terhadap perubahan teknologi, seperti yang disarankan oleh Setiawan (2021). Kedua, peningkatan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas agar perangkat keras dan jaringan yang digunakan mendukung aplikasi-aplikasi terbaru dengan lancar, sesuai dengan rekomendasi Hidayat (2021). Ketiga, untuk mengatasi ketergantungan pada sistem manual, pendekatan manajerial yang melibatkan sosialisasi dan komunikasi mengenai manfaat digitalisasi bagi pegawai sangat diperlukan. Terakhir, evaluasi berkala terhadap dampak pelatihan dan penerapan teknologi harus dilakukan untuk memastikan bahwa digitalisasi terus memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan langkah-langkah ini, digitalisasi administrasi pemerintahan di Kantor Camat Medan Baru dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Armstrong, M. (2012). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 12th Edition. Kogan Page.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M.S.P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, R. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Layanan Publik. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 12(1), 101-115.
- Indrajit, R.E. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Permendagri No. 81 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). *Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purnama, Y., & Santoso, H. (2020). Analisis Dampak Digitalisasi Administrasi Pemerintahan terhadap Efisiensi Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 22(3), 50-65.
- Rivai, V. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Setiawan, I. (2021). Pengaruh Pelatihan E-Government terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Manajemen Publik*, 24(4), 180-195.

- Sedarmayanti. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi. Bandung: Refika Aditama.
- Soesilo, H. (2019). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Implementasi E-Government. Jurnal Administrasi Negara, 19(2), 115-130.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi.
- Supriyanto, A. (2019). Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.